

RINGKASAN

PENERAPAN PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK DAERAH TERHADAP PENAMBANGAN BATU APUNG

S A R J A N,

PEMBIMBING (1) M. ZAINUDDIN. SH., MH

PEMBIMBING (2) ABDUL MUHID. SH., MH

Negara Indonesia merupakan Negara yang kaya akan sumberdaya alam yang melimpah sehingga banyak dilakukan usaha penambangan khususnya penambangan batu apung di kelurahan ijobalit, untuk itu pemerintah daerah perlu melakukan penarikan pajak untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Berdasarkan hal tersebut perlu adanya suatu kajian tentang bagaimana penerapan suatu Peraturan Daerah terhadap penambangan batu apung di Kelurahan Ijobalit.

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan peraturan daerah dan penerapan sanksi terhadap penambangan batu apung berdasarkan peraturan daerah nomor 10 tahun 2010 tentang pajak daerah, khususnya di kelurahan ijobalit kecamatan labuhan haji kabupaten lombok timur tahun 2015.

Data-data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui data primer dan data sekunder disamping bahan pustaka yang lain dan erat kaitannya dengan pembahasan skripsi ini. Penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada pemerintah daerah dan dinas instansi terkait terhadap penerapan peraturan daerah nomor 10 tahun 2010 tentang pajak daerah terhadap penambangan batu apung di kelurahan ijobalit.

Penerapan Peraturan Daerah harus tetap dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang ada dan di tindaklanjuti dengan Peraturan Bupati, dan wajib pajak membayar pajaknya berdasarkan penetapan kepala daerah berdasarkan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan berupa karcis dan nota penghitungan. Dan Pemerintah Daerah perlu melakukan sosialisasi terhadap Peraturan Daerah nomor 10 tahun 2010 tentang Pajak Daerah serta memberikan sanksi terhadap wajib pajak yang tidak memenuhi kewajibannya.

Kata kunci : *Penerapan PERDA dan Penegakan Hukum dalam peningkatan PAD*